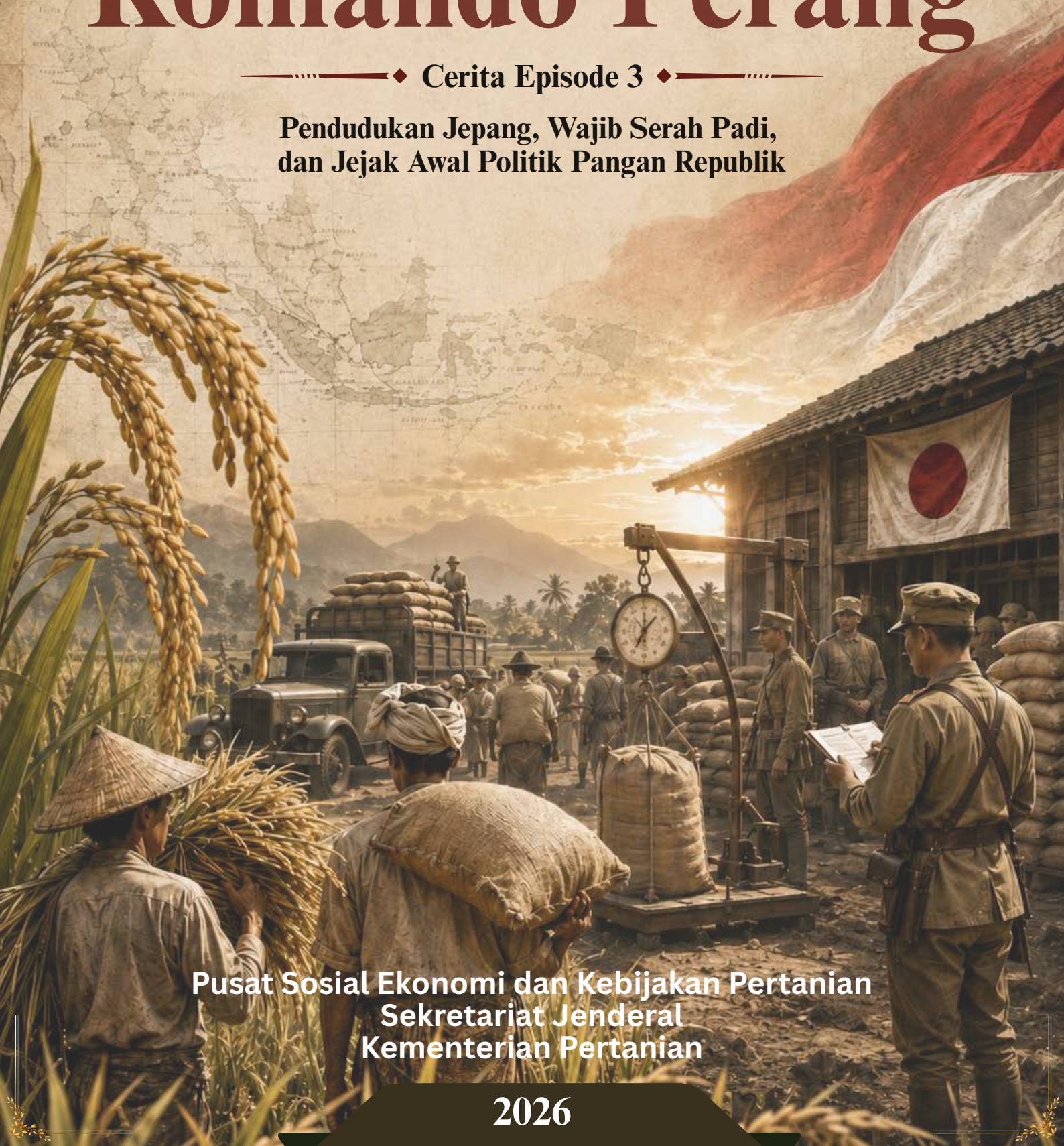




Beras di Bawah Komando Perang

— ♦ Cerita Episode 3 ♦ —

**Pendudukan Jepang, Wajib Serah Padi,
dan Jejak Awal Politik Pangan Republik**



**Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian**

Beras di Bawah Komando Perang

**Pendudukan Jepang, Wajib Serah Padi,
dan Jejak Awal Politik Pangan Republik**



**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2026



Pengantar

Pagi di sebuah desa di Jawa pada masa perang tidak lagi dimulai dengan rasa aman, namun aktivitas tetap berjalan seperti biasanya. Petani masih turun ke sawah, perempuan masih menjemur gabah, anak-anak masih bermain dan berlarian di halaman rumah. Namun di balik aktivitas yang tampak biasa itu, ada kecemasan yang tidak selalu terucap. Kegundahan senantiasa bergelayut karena dipenuhi pikiran atas beberapa pertanyaan yang terkait dengan hasil panen padi, seperti berapa bagian panen yang boleh disimpan untuk keluarga? Berapa yang harus diserahkan? Siapa yang akan datang ke rumah untuk menagih? Dan apakah padi yang disembunyikan di sudut lumbung akan cukup sampai musim berikutnya?

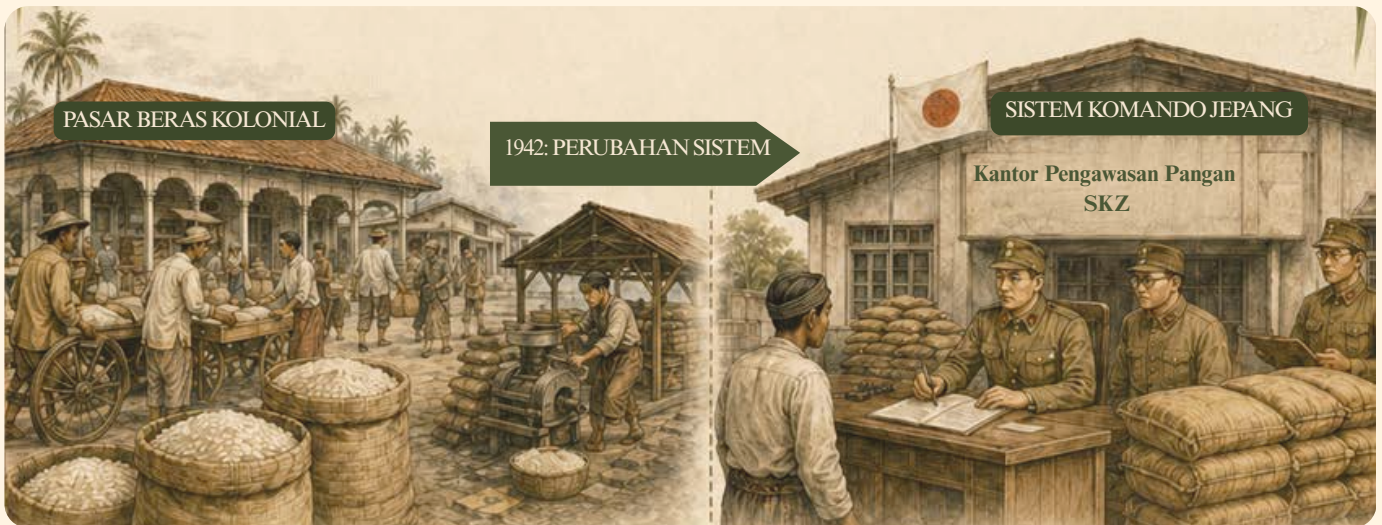
Pendudukan Jepang di Jawa berlangsung hanya tiga setengah tahun, tetapi dalam sejarah pangan meninggalkan bekas luka yang panjang dan dalam. Pada masa itu, beras tidak lagi diperlakukan (utamanya) sebagai barang dagangan, pajak, atau komoditas pasar; namun berubah menjadi urusan komando. Beras dihitung secara cermat untuk memenuhi kebutuhan tentara, pegawai pemerintah, penduduk kota, kepentingan perang, dan jaringan distribusinya hingga tingkat desa. Pengelolaan sawah tetap berada di tangan petani, tetapi keputusan mengenai hasil panen, harga, penggilingan, pengangkutan, dan penyerahan bagian untuk pemerintah ditentukan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Komoditas beras yang sudah relatif tertata pada era Hindia Belanda, dengan cepat berubah pada saat pendudukan Jepang. Walaupun instrumen kebijakan perberasan Hindia Belanda masih digunakan, namun prioritas penggunaan pangan beras untuk mendukung perang, menjadikan beras menjadi salah satu alat untuk menindas rakyat. Beras saat itu menciptakan dilema getir, antara kebutuhan makanan untuk menjaga mesin perang tetap berjalan namun rakyat membutuhkan beras untuk bertahan hidup. Di antara dua kebutuhan itu, pada akhirnya petani menjadi simpul yang paling tertekan.

Cerita episode ini berangkat dari ruang yang paling dekat dengan rakyat, yaitu sawah, dapur, lumbung kecil, penggilingan, dan jalan desa. Dari sana, kita mengikuti bagaimana padi masuk ke kantor pangan Jepang, bagaimana kuota turun melalui aparat lokal, bagaimana harga resmi kehilangan kepercayaan, bagaimana pasar gelap tumbuh, dan bagaimana awal Republik mewarisi alat pengendalian pangan yang belum selesai dibersihkan dari luka masa perang. Dalam perjalanan itu, beras tampak sebagai sesuatu yang vital sekaligus mudah menjadi fatal. Ia menyambung hidup, tetapi ketika dipaksa bergerak dengan cara yang tidak adil, ia bisa memecah kepercayaan antara rakyat dan penguasa [1][2].

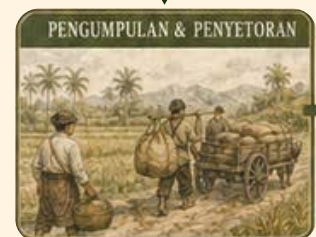
"Beras menyambung hidup, tetapi ketika dipaksa bergerak dengan cara yang tidak adil, ia bisa memecah kepercayaan antara rakyat dan penguasa."

Dari Pasar Kolonial ke Komando Jepang



Pendudukan Jepang di Jawa pada tahun 1942 menandai pergeseran drastis dalam kebijakan perberasan, di mana mekanisme pasar bebas yang matang pada era sebelumnya dihancurkan dan diganti dengan sistem komando militer yang kaku. Meskipun pada awal invasi stok pangan masih tergolong memadai berkat keberadaan lumbung sisa era kolonial dan hasil panen yang baik, otoritas Jepang segera menerapkan kontrol total guna mengintegrasikan ekonomi Jawa ke dalam mesin perang mereka. Melalui pembentukan Kantor Pengawasan Pangan (*Syokuryō Kanri Zimusho*-SKZ), pemerintah militer merombak institusi lama menjadi alat ekstraksi pangan yang agresif, di mana alokasi beras diprioritaskan secara ketat untuk kebutuhan tentara, pegawai sipil, dan tenaga kerja pendukung perang. Paradigma ini secara efektif memutus aliran distribusi pangan yang semula efisien, menciptakan isolasi ekonomi antarwilayah yang justru memicu kerentanan sistemik di tingkat lokal [1].

Inti dari kebijakan pangan Jepang terletak pada sistem pembelian padi paksa, yang dijalankan melalui jaringan koperasi lokal atau kumiai, dengan melibatkan birokrasi tradisional pangreh praja sebagai ujung tombak. Para petani dibebani kuota penyerahan padi yang sangat berat, dan sering kali ditentukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi riil di tingkat lapangan. Kondisi ini diperburuk oleh penetapan harga beli resmi yang sangat rendah dan terus tergerus oleh inflasi hebat, di mana petani sering kali hanya menerima kurang dari setengah nilai yang dijanjikan, setelah dipotong berbagai biaya administrasi, keanggotaan, dan pajak lahan. Kesenjangan yang mencolok antara harga resmi dan harga pasar gelap, yang bisa mencapai lima belas kali lipat, menciptakan disinsentif luar biasa bagi petani untuk menghasilkan surplus. Akibatnya, mereka cenderung membatasi produksi hanya pada level subsisten demi mengamankan kebutuhan keluarga sendiri [1].



Inti Perubahan



Pasar bebas diganti kontrol militer



SKZ menjadi pusat komando pangan



Kumiai dan pangreh praja jadi pelaksana



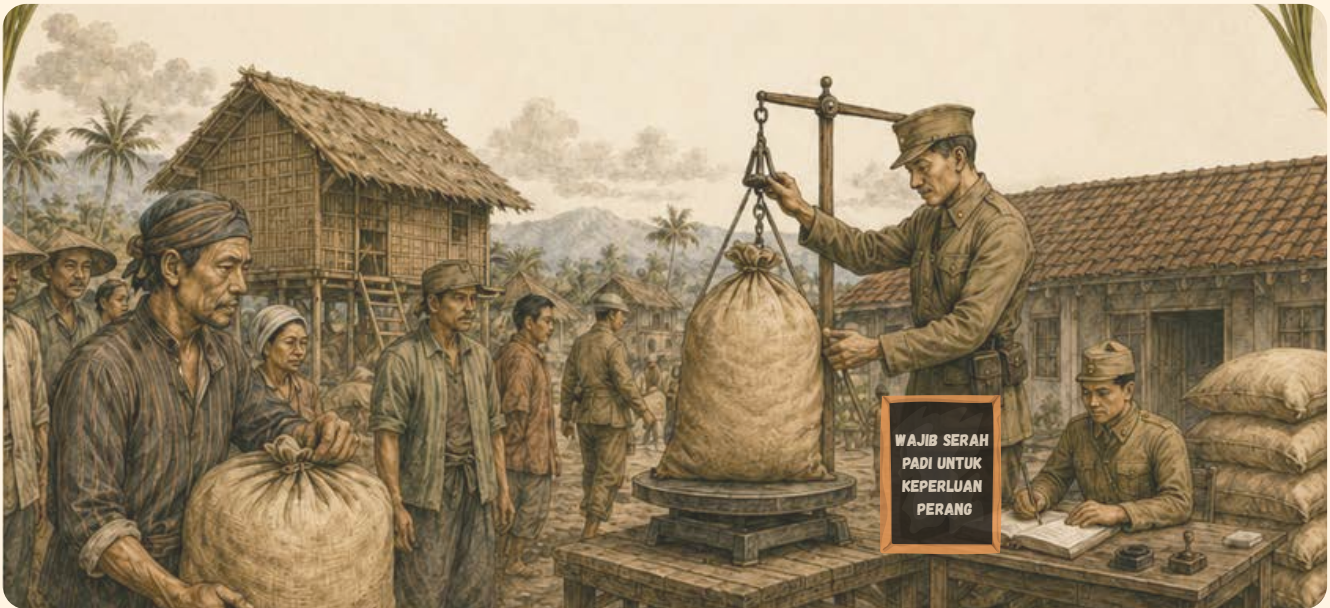
Aliran beras diprioritaskan untuk perang

Di sisi lain, upaya Jepang untuk menggenjot produktivitas lahan melalui pengenalan teknik budidaya baru dan varietas unggul dari Taiwan, justru menemui kegagalan besar karena mengabaikan preferensi lokal dan realitas teknis di pedesaan Jawa. Alih-alih meningkat, produksi padi justru merosot tajam akibat kerusakan infrastruktur irigasi yang tidak terawat, penyusutan drastis populasi ternak pembajak yang dipotong untuk konsumsi militer, serta hilangnya tenaga kerja produktif akibat mobilisasi *romusha* secara masif. Kebijakan yang memaksa penanaman varietas tunggal secara serempak, juga membuat lahan pertanian menjadi sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Akibatnya, meskipun pemerintah militer berupaya melakukan konversi lahan perkebunan menjadi sawah baru, hal tersebut tetap tidak mampu mengompensasi penurunan total produksi pangan nasional [1].

Tragedi kemanusiaan yang meletus pada periode 1944-1945 menjadi bukti kegagalan fatal kebijakan perberasan Jepang di Jawa, yang memicu bencana kelaparan hebat di wilayah lumbung padi seperti Bojonegoro dan Indramayu. Di wilayah perkotaan, jatah distribusi beras bagi penduduk sipil, terus dipangkas hingga ke tingkat yang tidak mencukupi untuk bertahan hidup, yang memaksa masyarakat miskin kota dan buruh tani tanpa lahan terjebak dalam kondisi gizi buruk kronis. Ketidakmampuan otoritas militer dalam menjamin kelancaran logistik dan transportasi pangan antar-residen, menyebabkan stok beras yang ada tetap terhenti di daerah surplus, sementara daerah defisit menghadapi kelaparan massal. Dampak akhir dari seluruh malapraktik kebijakan ini adalah angka kematian yang diperkirakan mencapai 2,4 juta jiwa; sebuah harga yang sangat mahal akibat penghancuran tatanan ekonomi pasar demi ambisi kekuasaan militer [1].



Wajib Serah Padi dan Retaknya Kepercayaan Desa



Puncak campur tangan Jepang dalam urusan beras adalah kewajiban penyerahan beras. Pada masa ini, petani tidak cukup hanya menanam dan memanen; namun mereka harus menyerahkan hasil panen sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pendudukan Jepang. Ketentuan dan cara penetapan kewajiban penyerahan hasil panen tidak sama antardaerah, seperti misalnya di beberapa tempat kuota didasarkan pada pajak tanah, di tempat lain pada luas sawah atau taksiran hasil. Van der Eng mencatat contoh Madiun, Kediri, Bogor, Semarang, Soreang, dan Ciparai untuk menunjukkan bahwa cara menghitung kewajiban beragam, tetapi akibatnya relatif sama, yaitu lebih sering menyengsarakan petani [1][5].



Di Madiun, setiap hektar lahan irigasi dipatok menghasilkan 0,5 hingga 0,6 ton dengan kewajiban menyerahkan 0,1 ton, namun praktiknya petani yang lahannya hanya menghasilkan 0,1-0,2 ton tetap dipaksa menyerahkan jumlah yang sama, sehingga mereka tidak memiliki sisa padi. Di Kediri, penyerahan ditentukan berdasarkan luas lahan, di mana petani dengan lahan hingga 2 hektar (ha) dikenakan kuota 20 persen, antara 2-5 ha sebesar 50 persen, dan di atas 5 ha mencapai 70 persen dari produksi. Sementara itu, di Bogor pada tahun 1945, beban kuota bagi petani berlahan hingga 1 ha adalah 40 persen, 1-3 ha sebesar 50 persen, 3-5 ha sebesar 60 persen, dan di atas 5 ha mencapai 75 persen. Di Semarang, kuota ditetapkan secara sewenang-wenang per sub-distrik berdasarkan perkiraan hasil panen dan luas wilayah, tanpa mempertimbangkan tempat tinggal pemilik lahan yang sebenarnya. Terakhir, di wilayah Priangan seperti Soreang, petani wajib menyerahkan 0,6 hingga 0,8 ton padi untuk setiap gulden pajak tanah yang mereka bayar, sedangkan di Ciparai penentuan jumlah penyerahan dilakukan melalui angka tetap yang dipatok per kepemilikan lahan [1].

Selama masa pendudukan Jepang, kebijakan harga beras dikendalikan secara terpusat oleh Kantor Pengawasan Pangan (SKZ), dengan menetapkan harga beli resmi gabah yang dipatok rendah, yakni mulai dari f3,25 per 100 kg pada awal pendudukan, hingga meningkat menjadi f15,00 pada Mei 1945. Namun, realitasnya petani hanya menerima sekitar 45 persen dari harga tersebut, setelah dipotong berbagai biaya administrasi dan praktik kecurangan oleh pihak koperasi (kumiai); sehingga menciptakan disinsentif produksi dan memicu pertumbuhan pasar gelap. Beras giling umumnya dikuasai oleh pemerintah, untuk didistribusikan secara terbatas dengan harga resmi yang dipatok sangat murah, sekitar 10 hingga 12 sen per liter pada akhir 1944. Sementara itu, beras tumbuk menjadi komoditas utama di pasar gelap pedesaan, dengan harga yang melonjak tajam dari f6,50 per 100 kg (1942) menjadi f200 (1945). Kesenjangan harga ini mencapai puncaknya di wilayah perkotaan, di mana harga eceran beras di pasar gelap bisa mencapai f3,25 per liter atau lebih dari 30 kali lipat harga distribusi resmi. Kondisi tersebut mencerminkan kegagalan total sistem kontrol pangan dalam menjamin keterjangkauan bagi rakyat jelata [1].

Dari sinilah konflik sosial menemukan bahan bakarnya. Bukan karena petani tidak memahami perang, melainkan karena perang menekan ruang hidup mereka sampai ke kebutuhan pangan. Ketika negara memandang beras sebagai cadangan pangan untuk perang, petani memandang beras sebagai sumber kehidupan keluarga. Perbedaan cara pandang tersebut tidak dapat diselesaikan dengan propaganda. Akibatnya, rakyat melakukan perlawanan melalui penyembunyian hasil panen, penjualan sembunyi-sembunyi, dan pada beberapa tempat berubah menjadi perlawanan terbuka.



Contoh Kuota



Madiun: irigasi 0,5-0,6 ton/ha, wajib serah 0,1 ton



Kediri: hingga 2 ha = 20%,
2-5 ha = 50% >5 ha = 70%



Bogor 1945: hingga 1 ha = 40%,
1-3 ha = 50%, 3-5 ha = 60%,
>5 ha = 75%



Semarang: kuota dipatok per sub-distrik



Priangan: berdasar pajak tanah atau angka tetap

RINGKASAN



1. HARGA RESMI DITEKAN RENDAH
Harga ditetapkan SKZ untuk kepentingan perang.



2. PETANI MENERIMA JAUH DI BAWAH HARGA
Potongan dan kecurangan membuat petani dirugikan.



3. PASAR GELAP TUMBUH CEPAT
Harga melonjak puluhan kali lipat, rakyat menderita.



4. RAKYAT MELAWAN DENGAN SEMBUNYI-SEMBUNYI DAN PERLAWANAN TERBUKA
Demi mempertahankan hidup dan harga diri.



Sumber: Arsip dan catatan sejarah tentang kebijakan pangan pada masa pendudukan Jepang di Jawa (1942-1945)

Kebijakan Penyediaan Beras



Untuk memenuhi kebutuhan perang yang makin besar, pemerintah pendudukan Jepang melancarkan kampanye “Melipatgandakan Hasil” (*Dōsanka*). Berbagai program teknis dan sosial dijalankan agar produksi padi meningkat, namun hasilnya jauh dari harapan.

Uraian berikut disintesa secara intensif dari buku “Kuasa Jepang di Jawa” karya Aiko Kurasawa [5]. Beras merupakan komoditas yang menjadi perhatian utama Pemerintah Jepang karena diperlukan untuk mensuplai kebutuhan pangan para tentara Jepang di medan pertempuran. Dengan terputusnya hubungan dagang dengan negara di luar koloni Jepang, maka praktis kebutuhan beras harus dipenuhi dari negara koloni Jepang, termasuk Indonesia. Untuk mendorong peningkatan produksi beras di Indonesia, Pemerintah Jepang membuat slogan “Melipatgandakan Hasil” yang dikampanyekan secara gencar melalui berbagai sarana komunikasi, seperti surat kabar, poster, film, dan teater. Melalui slogan tersebut, petani mendapat tekanan keras untuk mewujudkan peningkatan produksi padi. Berbagai program disusun pemerintah untuk dapat mewujudkan peningkatan produksi dua kali lipat, di antaranya:

- a). Produktivitas padi petani pribumi dinilai terlalu rendah (1,5 ton/ha beras) dibandingkan dengan petani di Jepang (3,8 ton/ha beras). Untuk itu, Jepang berupaya untuk mengganti varietas padi yang biasa ditanam petani pribumi, dengan varietas Horai yang dikembangkan di Taiwan. Sebelum pendudukan Jepang, petani pribumi lebih suka menanam “padi bulu” (padi berambut) karena rasanya lebih enak dan pulen dibandingkan “padi cere” (padi tak berambut), meskipun padi cere produktivitasnya lebih tinggi. Varietas padi Horai ini identik dengan padi cere, namun berumur pendek dan produktivitas tinggi. Untuk menghadapi petani yang bimbang untuk menggunakan varietas Horai, Jepang menggunakan kantor desa untuk mendistribusikan varietas tersebut ke petani. Metode ini secara bertahap dapat mengondisikan petani untuk mau menanam padi varietas Horai. Ketersediaan petani untuk menanam padi Horai juga tidak terlepas dari kebijakan wajib serah beras ke Pemerintah Jepang. A mereka memilih untuk menanam padi dengan produktivitas tinggi, agar masih ada bagian yang dapat dikonsumsi sendiri.
- b). Selain mengenalkan varietas padi baru, Jepang juga memperbaiki cara tanam padi yang sebelumnya tidak beraturan (acak) menjadi tanam pindah dalam larikan. Berdasarkan hasil penelitian, jarak tanam yang direkomendasikan adalah 20 cm. Selain itu, Jepang juga merekomendasikan penanaman bibit tidak lebih dari 2 cm dan menggunakan bibit dengan umur 20–25 hari setelah tebar bibit. Agar petani mau mengikuti perbaikan cara tanam tersebut, Jepang menugaskan tenaga ahli dari Jepang dan Indonesia untuk membuat percontohan di desa-desa. Awalnya petani keberatan untuk mengimplementasikan cara tanam baru tersebut, karena membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan lebih susah dari cara sebelumnya. Menghadapi hal ini, Jepang menggunakan cara tegas, yaitu mencabut pertanaman padi yang masih ditanam secara acak.

Ketegasan ini berhasil mengkondisikan petani untuk mengikuti cara tanam baru, dan bahkan dalam perkembangannya, petani mengakui bahwa cara tanam dalam larikan dapat meningkatkan produktivitas padi.

- c). Perbaikan teknis budidaya padi yang lain adalah anjuran untuk menggunakan pupuk kompos. Kebiasaan petani menggunakan pupuk kandang dan abu, diubah dengan memerintahkan petani untuk membuat pupuk kompos di pekarangan mereka sendiri. Cara yang disarankan adalah membuat lubang sedalam 1 meter, yang kemudian diisi dengan berbagai sampah daun, makanan, kotoran ternak, dan by product lainnya. Selain perbaikan pemupukan, Jepang juga mengenalkan alat penyiangan padi (penggaruk) yang disebut ganzume.
- d). Selain upaya intensifikasi, Jepang juga melakukan upaya ekstensifikasi melalui beberapa program sebagai berikut: (i) pembangunan irigasi dan saluran drainase; (ii) pembukaan hutan, utamanya di pesisir utara daerah Subang-Indramayu; dan (iii) alih fungsi lahan perkebunan (tebu, teh, dan kopi) menjadi lahan sawah.
- e). Pendidikan dan latihan serta propaganda juga dilakukan oleh Jepang, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan usahatani padi, serta membangun semangat petani untuk benar-benar meningkatkan produksi padi.

Upaya propaganda peningkatan produksi dilakukan dengan sangat serius, seperti memberi penghargaan kepada petani yang

berhasil meningkatkan produksi padi, pemutaran film dan cerita bergambar kamishibai tentang keberhasilan tanam padi, serta pidato penyemangat. Dalam propaganda ini juga melibatkan pemuka agama (kyai), untuk mendorong semangat petani meningkatkan produksi padi dengan mengutip beberapa ayat Al Quran, yang terkait dengan produksi tanaman.

Berbagai upaya tersebut apabila dalam kondisi normal, seharusnya dapat memberikan hasil yang signifikan dalam peningkatan produksi padi. Namun berdasarkan data yang dihimpun oleh Belanda setelah Jepang meninggalkan Indonesia, produksi padi selama kurun waktu 1942–1945 menurun drastis dibandingkan sebelum pendudukan Jepang. Rata-rata produksi padi sebelum pendudukan Jepang (1937-1941) mencapai 8,5 juta ton, namun setelah pendudukan Jepang, produksi padi secara konsisten mengalami penurunan mulai dari 8,3 juta ton (1942); 8,1 juta ton (1943); 6,8 juta ton (1944); dan puncaknya pada tahun 1945 hanya 5,6 juta ton (lebih rendah 33% dibanding produksi 1937-1941). Lantas apa yang menyebabkan produksi padi justru mengalami penurunan tajam? Berikut beberapa penjelasan penyebab produksi padi turun selama pendudukan Jepang:

- a). Walaupun ada informasi bahwa pada tahun 1944 di Jawa mengalami musim kering yang panjang, namun faktor iklim tidak dapat diterima sepenuhnya sebagai penyebab turunnya produksi selama periode pendudukan Jepang; karena sebelum itupun, petani juga sering mengalami fluktuasi iklim dan hasil produksinya relatif stabil.





FAKTA DI LAPANGAN

- Wajib setor padi memperkecil stok untuk benih dan konsumsi keluarga.
- Kualitas benih sering turun karena penyimpanan buruk.
- Alat pertanian sulit didapat.
- Pengawasan ketat, hukuman berat, dan target berlebihan.



MENGAPA PRODUKSI JUSTRU TURUN?

- Iklim bukan satu-satunya sebab.**
Curah hujan dan banjir berpengaruh, tetapi bukan faktor utama.
- Tenaga kerja tersedot romusha.**
Banyak petani sehat dipaksa bekerja untuk proyek & militer.
- Ternak bajak menyusut.**
Pemeritaan dan penyerahan ternak mengurangi kemampuan membajak sawah.
- Hama dan irigasi bermasalah.**
Serangan tikus, wereng, dan penyakit meningkat; jaringan irigasi rusak serta kekurangan air.
- Pembukaan lahan tidak efektif.**
Hutan yang dibuka umumnya tanah marginal, kurang subur, dan sulit dikelola.
- Tekanan kebijakan mengurangi kepatuhan.**
Paksaan, setoran, dan pemarikan lahan pangan membuat petani rendah semangat dan tidak fokus pada produksi.

- b). Kekurangan tenaga kerja dan terbatasnya alokasi waktu untuk kerja pertanian, sebagai akibat adanya mobilisasi tenaga kerja laki-laki untuk pembangunan proyek pertahanan, latihan baris berbaris, dan *romusha*. Upaya menutupi kekurangan tenaga kerja dilakukan dengan memobilisasi anak-anak sekolah serta narapidana.
- c). Ternak sapi yang biasanya digunakan untuk keperluan membajak sawah, juga mengalami penurunan drastis, karena adanya kebijakan setiap desa harus menyerahkan dua ekor setiap minggunya, untuk digunakan sebagai lauk bagi tentara Jepang. Selain itu, kepemilikan ternak sapi juga dibatasi 1 ekor per rumah tangga. Akibat dari kelangkaan ternak sapi adalah melonjaknya ongkos sewa sapi yang biasanya f0,6 menjadi f60.
- d). Serangan hama tikus tidak dapat dikendalikan dengan baik sebagai akibat langkanya bahan kimia yang selama ini digunakan untuk membasmi tikus (akibat embargo dari Eropa dan Amerika Serikat). Selain itu, infrastruktur pertanian, utamanya jaringan irigasi, ternyata juga tidak terawat dengan baik sebagai akibat dari terbatasnya tenaga kerja dan bahan bangunan.
- e). Pembukaan hutan juga tidak sepenuhnya berhasil, bahkan malahan menimbulkan bencana banjir. Selain itu, alih fungsi tanaman perkebunan ke padi juga kurang berhasil karena mengubah lahan kebun menjadi sawah ternyata tidak mudah.
- f). Tekanan kebijakan Jepang di sektor pertanian maupun nonpertanian yang sangat keras, ternyata justru menurunkan kepatuhan petani terhadap Pemerintah Jepang. Program peningkatan produksi padi tidak sepenuhnya diikuti, bahkan sebagian petani justru lebih memilih meninggalkan sektor pertanian.

Kegagalan upaya peningkatan produksi padi juga mendapat kritikan dari pihak Jepang sendiri. Salah seorang insinyur pertanian Jepang yang ditugaskan sebagai Pengawas Peningkatan Produksi (*zosan shidokan*), menyatakan bahwa mestinya Jepang menghargai pengetahuan budidaya padi para petani yang diyakini lebih memahami kondisi lahan dan lingkungannya. Selain itu, program yang ditetapkan oleh Jepang mestinya atas pertimbangan ilmiah, bukan asal ditetapkan. Menurut insinyur pertanian Jepang tersebut, kegagalan peningkatan produksi padi utamanya disebabkan oleh tidak adanya komunikasi antara pimpinan tertinggi militer dengan pelaksana di lapangan.

PENGETAHUAN PETANI

Petani lebih memahami lahan dan lingkungan

- Mengamati tanah, air, dan cuaca
- Menyesuaikan waktu tanam dan varietas
- Pengalaman turun-temurun di lapangan

PROGRAM SEHARUSNYA BERBASIS PERTIMBANGAN ILMIAH, BUKAN SEKADAR PERINTAH.

PERINTAH DARI ATAS

Kebijakan tidak sesuai kondisi lapangan

RENCANA PRODUKSI PADI

- ☒ TARGET TINGGI
- ☒ WAKTU TETAP
- ☒ VARIETAS TUNGGAL
- ☒ METODE SERAGAM

- Target produksi ditetapkan tinggi dan kaku
- Metode seragam tanpa melihat perbedaan daerah
- Mengabaikan pengalaman dan masukan petani

Ketika Distribusi Rusak, Pangan Menjadi Sumber Malapetaka



Pendudukan Jepang merombak total sistem perberasan di Jawa, dari mekanisme pasar bebas menjadi kontrol militer terpusat, melalui Kantor Pengawasan Pangan atau *Syokuryō Kanri Zimusho* (SKZ). Stabilitas pangan hancur bukan hanya oleh regulasi yang kaku, melainkan oleh penjarahan fisik infrastruktur transportasi di mana lokomotif, gerbong kereta, hingga kendaraan bermotor disita secara masif, dan dikirim ke luar Jawa untuk kepentingan mesin perang Jepang. Kelangkaan bahan bakar dan suku cadang melumpuhkan mobilitas barang, sehingga pengangkutan pangan harus dialihkan ke sarana tradisional yang jauh lebih lambat, terbatas, dan mahal, seperti gerobak sapi yang biayanya mencapai 15 kali lipat dari transportasi truk. Akibatnya, aliran stok beras dari daerah surplus ke daerah defisit terhenti secara spontan, menciptakan fragmentasi ekonomi ekstrem yang mengisolasi berbagai wilayah di seluruh pulau [1].

Kebijakan isolasi ekonomi ini dipertegas dengan larangan perdagangan dan pengangkutan bahan pangan pokok antar-karesidenan, tanpa izin khusus dari otoritas militer guna memastikan kuota penyerahan terpenuhi. Sistem distribusi resmi yang direncanakan pemerintah gagal menggantikan peran pasar bebas dalam mengalokasikan pasokan secara efisien, terutama karena target pembelian pemerintah sering kali tidak tercapai; akibat harga beli resmi yang dipatok terlalu rendah dan tidak menarik bagi petani. Ketidakmampuan otoritas dalam menjamin kelancaran logistik, memaksa setiap wilayah untuk menerapkan swasembada lokal yang semu; di mana stok beras mungkin menumpuk di satu titik, sementara daerah tetangganya menghadapi kelaparan akut. Praktik korupsi oleh pejabat lokal serta berbagai hambatan birokrasi dalam pengumpulan padi di tingkat desa, semakin memperburuk disfungsi sistem distribusi pangan nasional [1].

Guncangan sistemik ini berdampak signifikan pada asupan nutrisi penduduk, di mana rata-rata ketersediaan kalori harian di Jawa merosot tajam, menjadi hanya sekitar 1.550 hingga 1.580 Kcal per kapita pada periode 1944–1946. Angka ini berada sekitar 19 persen di bawah tingkat kebutuhan standar minimal sebesar 1.925 Kcal per hari, yang memaksa penduduk untuk mengurangi aktivitas fisik secara signifikan guna menyesuaikan dengan rendahnya asupan energi. Penurunan asupan pangan paling parah dirasakan di wilayah perkotaan dan karesidenan, yang secara tradisional merupakan daerah defisit pangan, seperti Bojonegoro dan Madura. Di Surabaya, rata-rata konsumsi harian bahkan diperkirakan merosot hingga level kritis 600 Kcal, sementara di Semarang hanya mencapai 900 Kcal; tingkat yang berada jauh di bawah batas bertahan hidup manusia secara layak [1].

Tragedi kemanusiaan ini menciptakan luka jangka panjang, berupa kasus gizi buruk kronis dan hambatan pertumbuhan fisik (*growth stunting*) pada anak-anak yang tumbuh di era tersebut. Masyarakat miskin kota dan buruh tani tanpa lahan, menjadi kelompok paling menderita karena sering kali tereksklusi dari sistem jatah distribusi resmi, yang hanya diprioritaskan bagi populasi terdaftar atau tenaga kerja pendukung perang. Ketidakmampuan pasar gelap dalam mengompensasi kegagalan distribusi resmi, mengakibatkan angka kematian yang diperkirakan mencapai 2,4 juta jiwa selama masa pendudukan Jepang di Jawa. Seluruh fakta ini menjadi bukti bahwa penghancuran mekanisme pasar dan infrastruktur logistik demi ambisi komando militer, telah mengubah Jawa dari lumbung pangan menjadi panggung bencana kelaparan masal yang mematikan [1][2].

Angka Penting



KCAL

Ketersediaan energi 1944–1946: sekitar **1.550-1.580** Kcal/kapita/hari



Batas kebutuhan minimal: sekitar **1.925 Kcal**



Surabaya: sekitar **600 Kcal/hari**



Semarang: sekitar **900 Kcal/hari**



Perkiraan korban: hingga **2.4 juta jiwa**

KRISIS GIZI DAN KELAPARAN DI JAWA

Asupan kalori merosot, distribusi gagal, korban meluas

DAHULU: LUMBUNG PADI



SEKARANG: KELAPARAN

- Produksi terganggu
- Transportasi rusak
- Distribusi militer didominasi
- Rakyat menderita kelaparan



2 ASUPAN ENERGI TURUN DRASTIS

Rata-rata ketersediaan kalori per kapita per hari di Jawa

1.550-1.580 Kcal/kapita/hari (1944-1946)	SELISIH 19% ↓	1.925 Kcal/hari (STANDAR MINIMUM)
--	---------------	-----------------------------------

= 19% di bawah batas minimum

DI BAWAH BATAS MINIMUM

3 DAERAH DEFISIT PANGAN

Semarang: 900 Kcal/hari

Surabaya: 600 Kcal/hari

Bojonegoro dan Madura juga termasuk daerah defisit berat.



4 JATAH RESMI TERBATAS

Distribusi bahan makanan diendalikan militer hanya untuk polisi yang terdaftar dan mendukung perang.

KARYA UNTUK TENAGA TERDAFTAR: POLISI, PASUKA, BONGKARA, PEKERJA LAINNYA



PENTYALURAN JATAH RESMI

PASAR GELAP TIDAK MAMPU MENUTUP KEKURANGAN

Pasokan dari pasar gelap terbatas, mahal, dan tidak menjangkau mayoritas rakyat.



5 DAMPAK JANGKA PANJANG

GIZI BURUK KRONIS

Kekurangan kalori dan protein menghambat pertumbuhan, menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan penyakit, dan memperpendek usia.

PERTUMBUHAN ANAK TERHAMBAT

Stunting (pendek) akibat kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhan.

TENAGA KERJA MELIHAR

Perkembangan tenaga kerja terhambat, produksi menurun, memperparah kelangkaan.



6 KELAPARAN MASSAL

Perkiraan korban: **2,4 JUTA JIWA**

KESIMPULAN

Kelaparan massal yang disebabkan militer dan pengambilalihan pasokan beras, mengubah penduduk sipil menjadi korban perang.

★ INGAT SEJARAHNYA, AGAR TIDAK TERULANG KEMBALI. ★

Indramayu dan Batas Kesabaran Petani



Selama masa pendudukan Jepang, sistem perberasan di Jawa mengalami perombakan total dari mekanisme pasar bebas menjadi kontrol militer terpusat, melalui Kantor Pengawasan Pangan atau *Syokuryō Kanri Zimusho* (SKZ). Rakyat, khususnya para petani, berada di bawah tekanan hebat akibat sistem penyerahan padi paksa (*Momi Kyoosyutu*), yang dijalankan melalui jaringan koperasi *kumiai* dan birokrasi pangreh praja, sebagai alat ekstraksi pangan untuk kepentingan mesin perang. Kuota penyerahan yang ditetapkan sering kali sangat berat dan ditentukan secara sewenang-wenang, tanpa mempertimbangkan kapasitas produksi riil dan harga beli yang sangat rendah. Ketidakadilan sistemik ini diperburuk oleh praktik korupsi pejabat lokal, yang menambah beban kuota demi keuntungan pribadi. Kondisi tersebut mengakibatkan petani lebih memilih membatasi produksi pada level subsisten atau menyembunyikan stok mereka [1].

Tekanan luar biasa ini memicu ledakan protes sosial di berbagai daerah, dengan wilayah Indramayu sebagai pusat perlawanan yang paling berdarah dan dramatis. Bagi petani Indramayu, padi memiliki kedudukan sakral sebagai simbol kehidupan (*Dewi Sri*), sehingga kewajiban penyerahan paksa tersebut dianggap sebagai ancaman langsung terhadap hajat hidup paling dasar. Peristiwa protes di Desa Kaplongan dan Cidempet pada tahun 1944, menjadi bukti nyata kemarahan rakyat yang tidak lagi terbendung terhadap tindakan sewenang-wenang tentara Jepang dan aparat lokal yang mendukungnya. Bentrokan fisik yang melibatkan ribuan petani, yang dipicu oleh solidaritas iman dan dipimpin oleh para kiai desa kharismatik, pecah sebagai bentuk jihad melawan ketidakadilan. Meskipun perlawanan ini bersifat spontan dan berumur pendek, tragedi tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas sosial, ketika negara memaksakan kebijakan pangan yang merampas kedaulatan petani atas hasil buminya sendiri [3].

Protes Indramayu bukan satu-satunya gejolak, sementara tekanan kuota dan kerusakan distribusi ikut membentuk keresahan di berbagai tempat. Polanya berulang, dimana pejabat lokal berada di antara komando atas dan kemarahan penduduk yang tereksplorasi. Orang desa lebih sering melihat wajah lurah, camat, atau aparat lokal, daripada wajah pemerintah militer. Akibatnya, konflik pangan mudah berubah menjadi konflik kewibawaan lokal [1][3].



Sesudah Proklamasi, Beras Tetap Menjadi Ujian Negara



Pasca menyerahnya Jepang pada Agustus 1945, kondisi ketersediaan beras di Jawa berada dalam fase transisi yang penuh ketidakpastian, di mana stok beras di penggilingan per 1 September 1945 tercatat sekitar 323.200 ton. Meskipun angka ini tampak cukup, jumlah tersebut sebenarnya tidak memadai untuk menjamin pasokan hingga masa panen berikutnya, terutama karena kegiatan pembelian padi oleh otoritas resmi praktis terhenti pada bulan September, akibat kekacauan birokrasi dan terputusnya komunikasi antarwilayah. Krisis ini diperparah oleh terhentinya aliran stok dari gudang-gudang desa ke penggilingan, serta dari penggilingan ke pusat kota, yang dipicu oleh munculnya kelompok bersenjata tidak resmi, yang sering menyita komoditas pangan untuk kepentingan pasar gelap atau alasan politik [1].

Guna mengelola situasi pangan yang kian kritis, Pemerintah Republik Indonesia segera membentuk Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) di bawah Kementerian Kemakmuran, untuk mengambil alih fungsi lembaga kontrol Jepang (*Syokuryō Kanri Zimusho*-SKZ).

Lembaga ini berupaya melanjutkan sistem pengadaan melalui jaringan penggilingan padi, namun efektivitasnya sangat terhambat oleh minimnya personel berpengalaman dan keterbatasan dana untuk membiayai operasional pembelian hasil panen. Di wilayah Jakarta, pengelolaan pangan bahkan menjadi arena sengketa kompetensi, antara otoritas Sekutu dengan Balai Agung bentukan Republik yang mengandalkan suplai dari PMR. Untuk mengatasi sengketa tersebut, pada Desember 1945 dibentuk Badan Urusan Makanan Rakyat (BUMA), untuk menangani pengadaan beras secara khusus bagi warga ibu kota guna menghadapi ancaman kelaparan di akhir tahun [1].

Kebijakan pengadaan pangan sepanjang sisa tahun 1945 masih mengandalkan sistem komando yang kaku, di mana petani diwajibkan menyerahkan 20 persen dari hasil panen mereka kepada negara. Ketentuan ini membagi jatah serah menjadi dua bagian, yakni 10 persen ditetapkan sebagai "pajak perang" yang harus diserahkan secara cuma-cuma tanpa imbalan, sementara 10 persen sisanya dijanjikan akan dibayar oleh pemerintah melalui kredit dari Bank Rakyat Indonesia.

Sayangnya, implementasi di lapangan sering kali diwarnai oleh praktik sewenang-wenang dan korupsi oknum pejabat lokal; ditambah lagi nilai pembayaran yang diterima petani sering kali sudah tidak memiliki daya beli, akibat inflasi yang melonjak tajam. Hal ini menciptakan keresahan besar di masyarakat dan membuat petani makin enggan untuk memproduksi surplus pangan [1].

Hingga pengujung tahun 1945, ketahanan pangan di Jawa tetap berada dalam kondisi kritis, akibat fragmentasi wilayah kekuasaan antara Republik dan tentara Sekutu. Upaya untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan beras, terganjal oleh blokade pangan antarwilayah serta rasa tidak aman di pedesaan, yang membuat petani memilih untuk hanya menanam sesuai kebutuhan keluarga sendiri. Di beberapa kota besar pasokan resmi sering kali terhenti, sehingga penduduk terpaksa bergantung sepenuhnya pada pasar gelap, dengan harga yang sangat mahal. Seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kelembagaan pangan telah beralih ke tangan Republik, kendala distribusi dan beban ekonomi yang ditinggalkan era pendudukan Jepang, masih menjadi penghalang utama dalam mewujudkan keadilan pangan bagi rakyat.

FAKTA KUNCI 1945–1946

-  Stok di penggilingan per 1 September 1945: sekitar **323.200 ton**
-  Petani diwajibkan menyerahkan **20%** panen
-  **10%** disebut 'pajak perang', **10%** dijanjikan dibayar
-  April 1946: tawaran bantuan **500.000 ton** beras ke India
-  Realisasi hingga akhir 1946: sekitar **54.461 ton** ekuivalen gabah



Diplomasi Beras dan Republik yang Ingin Diakui



Pada April 1946, Perdana Menteri Sjahrir melancarkan langkah diplomasi yang berani, dengan menawarkan bantuan 500.000 ton beras kepada India, yang saat itu tengah terancam bencana kelaparan hebat. Strategi ini dirancang bukan sekadar sebagai misi kemanusiaan, melainkan sebagai instrumen vital untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan Indonesia secara *de jure* di kancah internasional, serta membuka jalur perdagangan barter guna memperoleh tekstil yang sangat langka. Meskipun pemerintah kolonial Belanda merasa sangat keberatan, karena stok pangan di wilayah kekuasaannya sendiri masih genting; mereka tidak berdaya untuk menghalangi transaksi tersebut, karena posisi tawar Inggris melalui *South East Asia Command* (SEAC) yang lebih mengutamakan bantuan bagi India, serta keinginan Belanda untuk menjaga citra diplomatik di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa [1].

Realisasi kesepakatan yang ditandatangani pada Juli 1946 ini didukung penuh oleh pemerintah India, melalui penyediaan kantong goni serta pengiriman 200 unit truk beserta bahan bakarnya guna mengatasi kelumpuhan sistem transportasi di wilayah RI. Namun dalam pelaksanaannya, proses pengapalan beras tersebut mengalami hambatan teknis dan sering kali terhenti, akibat buruknya koordinasi birokrasi serta keterbatasan fasilitas pelabuhan yang ada. Hingga akhir tahun 1946, total beras yang berhasil dikirimkan hanya mencapai ekuivalen sekitar 54.461 ton gabah, sebuah angka yang secara volume jauh di bawah komitmen awal, namun secara politis berhasil memperkuat posisi Republik Indonesia di mata dunia.[1]

Di balik pencapaian diplomatik tersebut, terdapat beban berat yang harus dipikul oleh rakyat di pedesaan, di mana Panitia Beras India menerapkan sistem pengadaan yang kaku melalui penetapan kuota wajib yang menyerupai pola ekstraksi era pendudukan Jepang. Para petani dipaksa menyerahkan sebagian hasil panen mereka, dengan imbalan surat obligasi pemerintah yang dijanjikan dapat ditukar dengan tekstil impor dari India. Namun pada kenyataannya distribusi tekstil tersebut sering kali tidak sampai ke tangan petani, karena dialihkan untuk keperluan lain. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan pangan untuk diplomasi tampak melimpah, hal tersebut dicapai melalui mekanisme penyerahan paksa yang memicu kekecewaan dan mengabaikan kesejahteraan para petani.[1]

Penggunaan beras sebagai alat diplomasi, semakin mempertegas status beras sebagai komoditas strategis. Keberadaan beras dapat dengan cepat berubah dari sebagai pendukung perang, menjadi alat diplomasi pengakuan kemerdekaan sekaligus solidaritas antarnegara. Sebagai bahan pangan pokok yang ketersediaannya harus selalu ada, produksi padi harus berjalan sepanjang tahun. Petani padi akan selalu menjadi pahlawan yang tidak membutuhkan pengakuan negara; karena yang mereka butuhkan adalah hasil jerih payahnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.



Dukungan India



Pelaksanaan tersendat



Beban di Pedesaan



Makna besar RI

*“Beras bisa menjadi alat diplomasi negara,
tetapi bagi petani, ia tetap sumber hidup keluarga.”*

Warisan yang Tidak Selesai pada 1945



Secara politik, proklamasi kemerdekaan membuka bab baru negara Republik Indonesia; namun dalam pengelolaan pangan, sebagian perangkat masa pendudukan Belanda dan Jepang tetap terbawa. Sebagai negara yang baru merdeka, ketersediaan bahan pangan sangat diperlukan, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, yang tidak kalah penting adalah mendukung pelaksanaan tugas aparat keamanan negara dan pegawai pemerintah. Namun tantangannya tidak ringan, karena infrastruktur perhubungan dan transportasi masih banyak yang rusak, inflasi, dan kepercayaan pasar yang harus dipulihkan.

Pembelajaran mendasar dari transisi kebijakan pangan antara era kolonial dan pendudukan Jepang adalah efektivitas mekanisme pasar dibandingkan sistem komando yang kaku. Pada dekade 1930-an, pemerintah kolonial membuktikan bahwa integrasi pasar yang didukung oleh intervensi moderat melalui Yayasan Bahan Makanan (VMF), mampu meredam guncangan iklim ekstrem tanpa memicu lonjakan harga atau kelaparan massal. Sebaliknya, penghancuran sistem pasar oleh otoritas Jepang melalui Kantor Pengawasan Pangan (SKZ) yang memberlakukan kuota penyerahan paksa dengan harga beli resmi yang rendah, justru menjadi disinsentif luar biasa bagi petani. Hal ini memberikan pelajaran penting, bahwa kedaulatan pangan tidak bisa dicapai melalui tekanan administratif semata, karena petani akan cenderung membatasi produksi hanya pada level subsisten, jika hak ekonomi dan insentif pasar mereka dirampas.

Pentingnya pemeliharaan infrastruktur logistik dan stabilitas keamanan, menjadi pelajaran krusial lainnya bagi proses pemulihan ekonomi perberasan Republik Indonesia. Era pendudukan Jepang meninggalkan warisan kelumpuhan distribusi akibat penjarahan aset transportasi secara masif, yang menyebabkan stok beras menumpuk di daerah surplus, sementara daerah defisit menghadapi kematian massal. Di sisi lain, investasi publik pada sistem irigasi teknis dan pengembangan varietas unggul yang telah dirintis sejak masa kolonial, terbukti berperan sebagai pilar utama dalam menjaga produktivitas lahan jangka panjang. Pengalaman sejarah ini menegaskan bahwa tanpa jaminan keamanan di pedesaan serta infrastruktur logistik yang memadai, segala upaya peningkatan produksi nasional akan selalu terhambat oleh hambatan fisik yang melumpuhkan aliran pasokan antar wilayah.

Sintesa akhir dari pengalaman kedua masa pendudukan tersebut membentuk fondasi bagi kelembagaan pangan Republik Indonesia, yang kemudian bermuara pada pembentukan Yayasan Bahan Makanan (BAMA) pasca-kemerdekaan. Pemerintah Republik menyadari bahwa melanjutkan sistem komando total warisan Jepang (seperti pada PMR dan PPBM) di tengah inflasi tinggi dan kerawanan birokrasi, hanya akan memperburuk krisis pangan di tingkat rakyat. Oleh karena itu, proses pemulihan ekonomi diarahkan pada penggabungan disiplin administrasi pemerintah dengan pemulihan kekuatan pasar, guna menjamin stabilitas harga dan keadilan distribusi. Keberhasilan normalisasi pangan di akhir 1940-an, membuktikan bahwa perlindungan hak ekonomi petani, pemulihan sarana transportasi, dan intervensi pemerintah yang terukur, adalah kunci utama dalam membangun ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.



Sejarah perberasan di bawah bayang-bayang pendudukan Jepang, bertransformasi dari sekadar dinamika komoditas menjadi instrumen politik-militer yang paling keras sekaligus fatal bagi rakyat Jawa. Melalui Kantor Pengawasan Pangan (SKZ), negara meruntuhkan mekanisme pasar yang telah matang pada dekade 1930-an, dan menggantinya dengan sistem komando kaku yang membekukan aliran pangan antarwilayah. Ketika setiap bulir padi dipaksa mengalir sebagai kuota penyerahan (*Momi Kyoosyutu*), harga beli resmi ditekan hingga kehilangan daya beli, dan cadangan pangan desa dirampas demi kepentingan mesin perang; maka stabilitas sosial pun meledak dalam bentuk protes berdarah petani di Indramayu.



Tragedi ini, ditambah dengan kelumpuhan infrastruktur transportasi dan ambisi diplomasi beras ke India di tengah krisis, menegaskan pelajaran pahit bahwa urusan pangan bukan sekadar statistik produksi makro, melainkan manifestasi paling mendasar dari kontrak sosial dan hubungan moral antara negara dengan rakyatnya.

Pendudukan Jepang telah mempercepat penetrasi negara ke dalam ruang privat lumbung desa, di mana petani tetap menjadi produsen namun kehilangan kedaulatan atas jalur distribusinya sendiri. Warisan ekstraksi yang kaku ini tidak luruh saat fajar kemerdekaan menyingsing, melainkan menjadi bekal kelembagaan sekaligus beban ekonomi yang sangat berat bagi Republik Indonesia yang baru lahir. Dari pembentukan Jawatan Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) hingga transisi menuju Yayasan Bahan Makanan (BAMA), negara terus bergulat dengan dilema yang sama, yakni bagaimana mengurus beras di tengah pasar yang rapuh dan produksi yang belum stabil, sementara rakyat telah mematrikan beras sebagai hak hidup dasar yang tak dapat ditawar. Akar sejarah inilah yang kemudian membidani lahirnya lembaga logistik modern, memicu gelombang Revolusi Hijau, dan mendikte narasi swasembada nasional.





- 1  Pierre van der Eng. 2008. Food Supply in Java during War and Decolonisation, 1940–1950. Munich Personal RePEc Archive Paper No.8852. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/8852/1/MPRA_paper_8852.pdf
- 2  Pierre van der Eng. 2020. Peraturan dan Pengendalian. Menjelaskan Penurunan Produksi Pangan di Jawa 1940-1946 dan Kelaparan 1944-1945. Lembaran Sejarah, 16(1), 3-24. <https://journal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/download/59909/29263>
- 3  Wahyu Iryana. 2016. Protes Sosial Petani Indramayu Masa Pendudukan Jepang 1942–1945. Patanjala, 8(3), 285-300. <https://www.neliti.com/publications/291897/protes-sosial-petani-indramayu-masa-pendudukan-jepang-1942-1945>
- 4  National Diet Library. The Japanese Occupation of Indonesia. Dalam The Birth of the Constitution of Japan. <https://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/history04.html>
- 5  Aiko Kurasawa. 2015. Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942–1945. Depok: Komunitas Bambu. Entri bibliografis Google Books.